

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang masih lemah, dan ditambah dengan kebijakan pemerintah yang umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga kebijakan tersebut belum berhasil memecahkan kelompok ekonomi rakyat bawah. Dengan demikian kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/ belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik kemampuan dalam pemilihan faktor

---

<sup>1</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 59.

produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.<sup>2</sup>

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan ekonomi dapat di definisikan sebagai “suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (*Income per-kapita*) dalam jangka panjang”. Kemakmuran itu sendiri ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat (Produk Domestik Bruto atau GNP).<sup>3</sup> Berikut adalah data pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat Provinsi Banten.

---

<sup>2</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 79.

<sup>3</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di**  
**Provinsi Banten (Juta Rupiah) 2010–2016**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab Pandeglang	10.639	11.766	12.887	13.9	15.318	17.022	18.466
Kab Lebak	10.397	11.416	12.24	13.416	14.766	16.282	17.608
Kab Tangerang	20.37	22.262	23.662	25.515	27.999	30.133	31.394
Kab Serang	24.021	26.822	29.241	31.685	35.077	38.457	41.28
Kota Tangerang	37.004	40.779	43.919	48.433	54.981	60.904	64.997
Kota Cilegon	118.693	129.792	141.651	155.025	172.092	187.47	196.843
Kota Serang	21.607	23.856	25.576	28.204	31.148	33.966	36.533
Kota Tangerang Selatan	23.508	25.921	28.02	30.724	33.539	36.3	38.098
Provinsi Banten	25.398	27.977	30.202	32.992	36.629	40.028	42.311
Pertumbuhan	8%	10.15%	7.95%	9.23%	11.02%	9.28	5.70%

*Sumber: BPS Provinsi Banten (Data diolah)*

Terlihat bahwa produk domestik regional bruto Provinsi Banten terus mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan meningkatnya kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan

nilai tambah pada suatu waktu tertentu<sup>4</sup>, dalam hal ini nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi (lapangan usaha) atas berbagai aktivitas produksinya.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circke of poverty*) dari Nurkse. Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi

---

<sup>4</sup> BPS Provinsi Banten, *Banten Dalam Angka 2017* (Banten: CV. Dharmaputra, 2017), 441.

modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya.<sup>5</sup> Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan (IPM) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi**  
**Banten 2010-2016**

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Pandeglang	59.08	59.92	60.48	61.35	62.06	62.72	63.4
Kab. Lebak	58.83	59.82	60.22	61.13	61.64	62.03	62.78
Kab. Tangerang	68.01	68.45	68.83	69.28	69.57	70.05	70.44
Kab. Serang	60.96	61.97	62.97	63.57	63.97	64.61	65.12
Kota Tangerang	73.69	74.15	74.57	75.04	75.87	76.08	76.81
Kota Cilegon	68.8	69.26	70.07	70.99	71.57	71.81	72.04
Kota Serang	68.25	68.69	69.43	69.69	70.26	70.51	71.09
Kota Tangerang Selatan	-	76.99	77.68	78.65	79.17	79.38	80.11

---

<sup>5</sup> Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Jilid 1 Edisi ke-3* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 241.

<b>Povinsi Banten</b>	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96
Pertumbuhan	0.87	1.01%	1.03%	0.80%	0.60%	0.54%	0.98%

*Sumber: BPS Provinsi Banten (Data diolah)*

IPM dari Provinsi Banten setiap tahunnya terus mengalami kenaikan yang signifikan. Meningkatnya IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan manusia di suatu wilayah yang mencakup dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar manusia. Dilihat dari tabel di atas penduduk di Banten memiliki kemampuan yang baik dalam mengakses hasil pembangunan.

Apabila dicermati ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia tersebut adalah pertumbuhan yang semu (*bubble economics*). Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia meski pertumbuhan PDRB dan IPM dikatakan bagus. Berikut ini adalah data pertumbuhan penduduk miskin yang tersebar di Provinsi Banten.

**Tabel 1.3**  
**Pertumbuhan Penduduk Miskin (%) Tahun 2010-2016**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kab Pandeglang	11,14	9,8	9,28	10,25	9,5	10,43	9,67
Kab Lebak	10,38	9,2	8,63	9,5	9,17	9,97	8,71
Kab Tangerang	7,18	6,42	5,71	5,78	5,26	5,71	5,29
Kab Serang	6,34	5,63	5,28	5,02	4,87	5,09	4,58
Kota Tangerang	6,88	6,14	5,56	5,26	4,91	5,04	4,94
Kota Cilegon	4,46	3,98	3,82	3,99	3,81	4,1	3,57
Kota Serang	7,03	6,25	5,7	5,92	5,7	6,28	5,58
Kota Tangerang Selatan	1,67	1,5	1,33	1,75	1,68	1,69	1,67
Provinsi Banten	7,46	6,26	5,71	5,89	5,51	5,9	5,42
Pertumbuhan	-8%	-16%	-9%	3%	-6%	7%	-8%

*Sumber: BPS Provinsi Banten (Data diolah)*

Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten memang cenderung turun dari tahun 2010-2016 akan tetapi mengalami fluktuatif di tahun 2013 dan 2015.

Permasalahan kemiskinan dalam pembangunan sangat sering di jumpai di hampir seluruh negara di dunia.

Permasalahan yang terjadi pun memiliki karakteristik yang hampir sama dimana kemiskinan yang tinggi terjadi di sebuah wilayah pedesaan atau disebuah wilayah yang memiliki tingkatan kepadatan yang sangat tinggi.<sup>6</sup>

Beberapa hasil kajian dan penelitian telah diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat. Asian Development Bank menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. Pada periode setelah krisis, berkurangnya penduduk miskin lebih banyak disebabkan karena membaiknya stabilitas ekonomi dan turunnya harga bahan makanan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan.<sup>7</sup>

Siregar dan Wahyuniarti meneliti mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk

---

<sup>6</sup> Ari Widodo, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2006), 132.

<sup>7</sup><https://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/2800161106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/reducingpoverty.pdf>, diakses 5 November 2018.



miskin diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun dengan magnitudo yang relatif kecil, seperti inflasi, populasi penduduk, *share* sektor pertanian, dan sektor industri.<sup>8</sup>

Sitepu dan Sinaga mengkaji mengenai dampak investasi sumber daya manusia terhadap kemiskinan diperoleh hasil bahwa Investasi sumberdaya manusia untuk pendidikan dapat menurunkan *poverty incidence*, *poverty depth* dan *poverty severity* kecuali untuk rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa, bukan angkatan kerja di kota dan bukan pertanian golongan atas di kota, sedangkan investasi kesehatan hanya di rumahtangga bukan pertanian golongan atas di kota yang mengalami peningkatan sementara rumah tangga lainnya mengalami penurunan indeks kemiskinan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin* (ITB, 2011).

<sup>9</sup> Rasidin Karo Karo Sitepu, et al. "Dampak Investasi Sumber Daya Manusia terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia." *Forum Pascasarjana Institut Pertanian Bogor*. Vol. 32. No. 2. 2009.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*), peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang sehingga akan mampu membantu dalam mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN PERIODE 2010-2016”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan bahwa sesuai dengan keadaan di Provinsi Banten, angka indeks pembangunan manusia dan produk

domestik regional bruto terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya, namun kenaikan tersebut tidak diiringi dengan penurunan kemiskinan. Yang terjadi adalah angka kemiskinan di Provinsi Banten terus mengalami fluktuasi yang tidak menentu.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten?

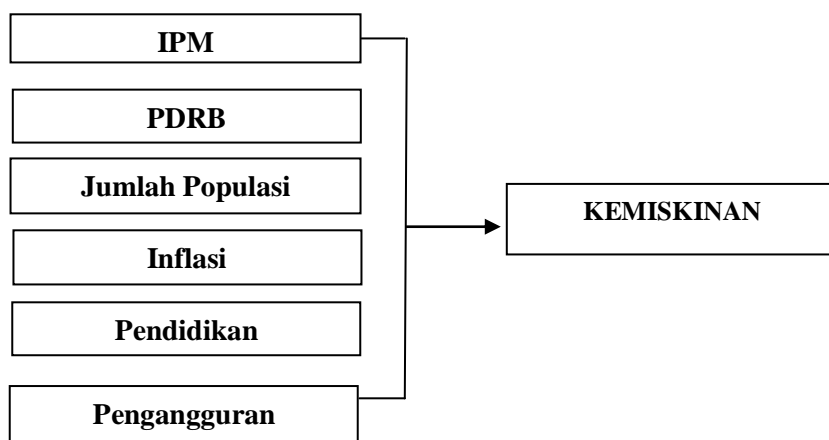
4. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten?

#### **D. Batasan Masalah**

Menurut Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan<sup>10</sup> seperti tertera di gambar 1.1

**Gambar 1.1**

#### **Faktor Yang Menyebabkan Kemiskinan**



---

<sup>10</sup> Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin* (ITB, 2011).

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten;
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten;
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

### 1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna di dalam memahami pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan terhadap kemiskinan sehingga dapat digunakan sebagai pilihan pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

### 2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai kemiskinan

dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Permasalahan kemiskinan dalam pembangunan sangat sering di jumpai di hampir seluruh negara di dunia. Permasalahan yang terjadi pun memiliki karakteristik yang hampir sama dimana kemiskinan yang tinggi terjadi di sebuah wilayah pedesaan atau disebuah wilayah yang memiliki tingkatan kepadatan yang sangat tinggi.<sup>11</sup>

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasarnya (makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan).<sup>12</sup>

Berbagai upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin, salah satunya adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Todaro, pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri.

---

<sup>11</sup> Ari Widodo, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2006), 132.

<sup>12</sup> Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Edisi Ke-3* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 294.

Sehingga pembangunan manusia memiliki peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

PDRB per kapita merupakan suatu masalah yang sangat berhubungan dengan jumlah penduduk miskin. Menurut Sadono Sukirno, laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil- hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga<sup>13</sup>

Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan perubahan corak

---

<sup>13</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi : Teori Pengantar Edisi Ke-3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 210.



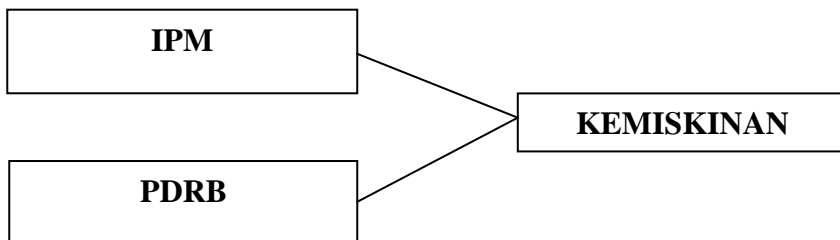
perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara.

Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. Selanjutnya menurut penelitian Deni Tisna Amijaya mengatakan bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin dalam suatu kerangka pemikiran seperti berikut :

---

<sup>14</sup> Tisna, A. Deni. 2008. *Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004.*

**Gambar 1.2****Kerangka Pemikiran****H. Sistematika Penulisan**

Agar lebih tersusun dan terarah dalam pembahasan proposal skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari studi ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian terakhir dalam bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian teori mengenai kemiskinan, Indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto, hubungan antar variabel, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini dan penentuan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

**BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan mengenai

hasil analisis dari objek penelitian.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir, bab yang menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Kemiskinan**

###### 1.1 Definisi dan Ukuran Kemiskinan

Menurut KBBI, Miskin memiliki artian tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).<sup>15</sup> Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasarnya (makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan).<sup>16</sup>

kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah

---

<sup>15</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/MISKIN>, diakses 10 Oktober 2018.

<sup>16</sup> Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Edisi Ke-3* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 294.

ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, standar pendidikan, tingginya kriminalitas dan lain sebagainya yang muncul dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Dalam Buku Pedoman Penanggulangan Kemiskinan tahun 2003 disebutkan, bahwa yang dimaksud masyarakat miskin umumnya ditandai ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan;
- b. Ketidakberdayaan melakukan kegiatan usaha produktif;
- c. Ketidakberdayaan menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi;

---

<sup>17</sup> Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 59.

- d. Ketidakberdayaan menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan serta sikap apatis dan fatalistik;
- e. Ketidakberdayaan membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah. Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan tersebut menumbuhkan perilaku miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal di atas pengertian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum

---

<sup>18</sup> Efendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : transformasi perekonomian rakyat menuju kemandirian* (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009), 61.

meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, SDA dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.<sup>19</sup>

Menurut Robert Chambers, inti masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci, *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan.<sup>20</sup>

Tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) merupakan dua masalah besar di banyak banyak

---

<sup>19</sup> Efendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : transformasi perekonomian rakyat menuju kemandirian* (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009), 163.

<sup>20</sup> Efendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat : transformasi perekonomian rakyat menuju kemandirian* (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009), 61.



negara besar, tidak terkecuali di Indonesia.<sup>21</sup> Ada dua pandangan mengenai kemiskinan yaitu : (1) Bahwa kemiskinan tumbuh akibat perilaku individu yang menyimpang (*mal adavtife*) dimana perilaku tersebut merupakan tanggung jawab individu dan dapat disembuhkan oleh individu itu sendiri; (2) Kemiskinan sebagai hasil dari kondisi sosial ekonomi, dimana kaum miskin memiliki kontrol yang sedikit.<sup>22</sup>

Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (*inequality*). Perbedaan ini sangat perlu ditekankan. Kemiskinan berkaitan erat dengan standar hidup absolut dari bagian masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan

---

<sup>21</sup> Tulus TH Tambunan, *Perekonomian Indonesia Edisi Cet. Ke-3*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 105.

<sup>22</sup> Samuel Nordhaus, *Ilmu Makroekonomi Edisi Ke- 17* (Jakarta: Media Global Edukasi, 2003), 476.

dimiliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan sangat tinggi.<sup>23</sup>

Aristoteles telah memberi dasar bagi ilmu ekonomi seperti apa yang diucapkannya “Kemiskinan adalah bapaknya revolusi dan kejahatan”. Jika dikaitkan dengan ilmu ekonomi jelas ucapan Aristoteles itu tidak lepas dari upaya ahli untuk mencari jalan atau teori agar umat manusia, keluarganya atau bangsanya menjadi kaya atau makmur dan tidak miskin. Karena jika miskin akan menjadi orang jahat. Contohnya di Indonesia walaupun sudah puluhan tahun merdeka tetapi yang dibawah garis kemiskinan makin bertambah. Tidak heran jika setiap hari ada berita kejahatan, tentu karena yang melakukan kejahatan pada umumnya adalah orang miskin.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, masalah, dan Kebijakan Edisi Ke-3* (Yogyakarta (UPP) AMP YKPN,1997), 122.

<sup>24</sup> Bachrawi Sanusi, *Tokoh Pemikir Dalam Mahzab Ekonomi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 8.

Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan menurut Nurkse secara sederhana dan yang dapat dibedakan menjadi dua pengertian :

1. Kemiskinan Absolut adalah bila pendapatan seseorang tidak dapat mencapai kebutuhan hidup minimum (makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan);
2. Kemiskinan Relatif adalah dimana sebenarnya pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan minimum, tetapi masih dianggap miskin karena masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya.

## 1.2 Penyebab Kemiskinan

Adapun penyebab kemiskinan, Sharp mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 78.

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang;
2. Kemiskinan timbul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia;<sup>26</sup>
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitasnya. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berakibat pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi mengakibatkan pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berfikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953 yang mengatakan bahwa : *a*

---

<sup>26</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 78.

*poor country is poor because it is poor*

(Negara miskin itu miskin karena miskin).<sup>27</sup>

### 1.3 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni : tingkat konsumsi beras perkapita pertahun, tingkat pendapatan, kebutuhan fisik minimum (KFM), dan tingkat kesejahteraan.

#### 1. Tingkat Konsumsi Beras

Sajogyo menggunakan tingkat konsumsi beras sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan penduduk mengkonsumsi beras kurang dari 240 Kg. Perkapita pertahun bisa digolongkan miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 Kg. Perkapita pertahun.

#### 2. Tingkat pendapatan

BPS menetapkan pendapatan didaerah perkotaan yang dibutuhkan untuk melepaskan dari kategori kemiskinan adalah Rp. 4. 522, 00

---

<sup>27</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 79.

perkapita pada tahun 1976, sedangkan pada tahun 1993 adalah Rp. 27, 905, 00. Di daerah pedesaan pendapatan yang dibutuhkan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan yakni Rp. 2.849,00 pada tahun 1976 dan Rp. 18.244,00 pada tahun 1993.

### 3. Tingkat Kesejahteraan Sosial

Selain pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen tingkat kesejahteraan yang lain yang sering digunakan. Pada publikasi yang berjudul *International Definition and Measurement of Levels of Living : An Interim Guide* disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 80.

#### 4. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM)

Salah satu yang paling sering dipakai adalah *kebutuhan fisik minimum* (KFM), yaitu ukuran jumlah kalori minimum yang harus dipenuhi seseorang per hari. Di Indonesia batas minimum kalori yang harus masuk adalah 2.100 kalori per orang per hari. Kalori ini diperoleh dengan mengonsumsi beras, sayur mayur, buah, lauk-pauk dan susu (empat sehat lima sempurna). Dengan menggunakan ilmu gizi, dapat disusun kombinasi minimal makanan untuk mencapai 2.100 kalori. Kombinasi tersebut dikalikan dengan harga yang berlaku akan diperoleh anggaran minimum untuk memenuhi KFM. Angka ini menunjukkan batas penghasilan minimum kemiskinan absolut. Angka ini jugadipakai untuk menentukan *upah minimum provinsi* (UMP).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Edisi Ke-3* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 294.

Tujuan penghitungan kemiskinan dan jumlah keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan adalah untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program perbaikan distribusi pendapatan. Tujuan lebih lanjut adalah memperkuat dan memperbaiki kehidupan bangsa, melalui perbaikan kehidupan ekonomi.<sup>30</sup>

## **2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

### **2.1 Definisi IPM**

Sumber daya manusia merupakan landasan utama bagi kesejahteraan setiap negara. Sumber daya modal merupakan faktor-faktor produksi yang pasif, sedangkan manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengamulaskan modal, mengolah sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi dan politik serta melaksanakan pembangunan nasional lebih lanjut. Jelasnya, suatu negara yang tidak mampu mengembangkan

---

<sup>30</sup> Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Edisi Ke-3* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 295.



keterampilan dan pengetahuan serta kecakapan penduduknya maupun memanfaatkannya secara efektif didalam ekonomi nasional berarti tidak akan mampu mengembangkan apa pun juga.<sup>31</sup>

Pengembangan atau pembangunan modal manusia adalah “proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara.<sup>32</sup>Pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Frederick H. Harbison, *Human Resources as the Wealth of Nation* (Oxford: Oxford University Press, 1973), 3.

<sup>32</sup> M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Edisi Ke-1* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 414.

<sup>33</sup> Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia Cetakan Ke-8* (Bandung: Alfabeta, 2014), 123.

## 2.2 Ranking dan Perhitungan IPM

*United Nation Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 telah menerbitkan *Human Development Report*. Hal yang menarik dalam laporan tersebut adalah penyusunan dan perbaikan *Human Development Index* (HDI). Seperti PQLI, HDI mencoba me-*ranking* semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) dan 1 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu :

- a) Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup,<sup>34</sup>
- b) Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimpang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga), dan

---

<sup>34</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 40.

c) Penghasilan yang diukur dengan pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

Dengan 3 ukuran pembangunan ini dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap sekita 160 negara, maka ranking HDI-nya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

- a) Negara dengan pembangunan manusia yang rendah (*low human development*) bila HDI berkisar antara 0,0 hingga 0,50;
- b) Negara dengan pembangunan manusia yang menengah (*medium human development*) bila HDI berkisar antara 0,50 hingga 0,78;
- c) Negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (*high human development*) bila HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2016), 40.

Penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak)

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min}) \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana :

$X_i$  : indikator komponen pembangunan manusia ke-  $i$ ,  $i = 1,2,3$

$X_{\min}$  : nilai minimum  $X_i$

$X_{\max}$  : nilai maksimum  $X_i$

### 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

#### 3.1 Definisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Nasional Bruto adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi negara itu dan dijual ke pasar pada kurun waktu tertentu.<sup>36</sup>

Produk pembangunan Indonesia jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, maka keberhasilan pembangunan dapat diukur dari peningkatan

---

<sup>36</sup> Paul L. Krugman & Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan, Ed. 5, Jilid 2* (Jakarta: PT. Indeks, 2005), 5.

pendapatan nasional.<sup>37</sup> Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris, yang berusaha menaksir pendapatan nasional Inggris pada tahun 1665<sup>38</sup>. Pendapatan Nasional atau regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat secara nasional. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan nasional maupun pendapatan rata-rata nasional.<sup>39</sup>

Dalam mengukur pendapatan suatu wilayah di gunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

---

<sup>37</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonom Cetakan Ke-9* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 119.

<sup>38</sup> Sukwiyaty, Sudirman Jamal dan Slamet Sukanto, *Ekonomi Kelas 2 SMA* (Bandung: Yudhistira, 2004)

<sup>39</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Ed. Revisi (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2012), 13.

Angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kenaikan/ penurunan dapat dibedakan menjadi 2 faktor berikut.

- a. Kenaikan/ penurunan riil, yaitu kenaikan/ penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapat penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat;
- b. Kenaikan/ penurunan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi (menurunnya nilai beli uang) maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu di beli belum tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkat

lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harga.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil), faktor inflasi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Pendapatan regional yang didalamnya masih ada unsur inflasinya dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional yang sudah ditiadakan merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Untuk mengetahui apakah daya beli masyarakat meningkat atau tidak, pendapatannya harus dibandingkan dalam nilai konstan. Dengan alasan inilah maka pendapat regional perlu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan.

Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang disajikan patokan harga disebut tahun dasar untuk penentuan

---

<sup>40</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 21.

harga konstan. Jadi, kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap (konstan). Akan tetapi, pada sektor jasa yang tidak memiliki unit produksi, nilai produksi dinyatakan dalam harga jual. Oleh karena itu, harga jual harus dideplasi dengan menggunakan indeks inflasi atau deflator lain yang dianggap lebih sesuai. Pada tahun 1995, BPS menggeser tahun dasar bagi penentuan harga konstan yaitu dari tahun 1983 menjadi tahun 1993 laju pertumbuhan ekonomi umumnya diukur dari kenaikan nilai konstan.<sup>41</sup>

Secara eksplisit PDRB berdasarkan harga berlaku merupakan hasil perkalian harga barang yang di produksi dengan jumlah barang yang dihasilkan. Sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan diperoleh dengan terlebih dahulu menentukan tahun dasar (*based year*) yang merupakan tahun dimana

---

<sup>41</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 21.



perekonomian dalam keadaan stabil. Harga barang pada tahun tersebut digunakan sebagai harga konstan.<sup>42</sup>

### 3.2 Cara perhitungan PDRB

Pembangunan wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu yang dimaksud dengan pendapatan rata-rata (income per kapita) masyarakat, untuk itu perlu diketahui alat ukur dan metode yang dipakai untuk menetapkan besarnya tingkat pendapatan masyarakat.<sup>43</sup>

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga metode, yaitu metode produksi, pengeluaran dan pendapatan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Edisi Ke-3* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 12-15.

<sup>43</sup> Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Ed. Revisi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 13.

<sup>44</sup> Nurul Huda, et.al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 22-25.

### 1) Metode Produksi

Perhitungan dengan metode ini menghasilkan *gross domestic product* (GDP) atau produk domestik bruto (PDB). PDB diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (*gross value added*) dari semua faktor produksi. Penggunaan nilai tambah dilakukan guna menghindari terjadinya perhitungan berganda (*double* atau *multiple counting*).

### 2) Metode Pengeluaran

GNP atau produk nasional bruto diperoleh dengan menjumlahkan permintaan akhir unit-unit ekonomi, yang terdiri dari :

- a. Rumah tangga berupa konsumsi yang sering disingkat **C**
- b. Perusahaan berupa investasi yang sering disingkat **I**

- c. Pengeluaran konsumsi pemerintah (*government expenditure*) yang sering disingkat **G**.
  - d. Pengeluaran Ekspor (**X**) dan impor (**M**).
- 3) Metode Pendapatan<sup>45</sup>

Menurut pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan cara mengurangi penyusutan dari stok modal yang ada selama periode tertentu. Penyusutan merupakan ukuran dari bagian produk nasional bruto yang harus disisihkan untuk menjaga kapasitas produksi dari perekonomian.

Data produk nasional bruto (PNB) lebih banyak dibandingkan dengan *Net National Product* (NNP) karena persoalan estimasi penyusutan mungkin tidak teliti dan juga tidak tersedia dengan cepat sedangkan perkiraan PNB tersedia dalam bentuk sementara. Namun

---

<sup>45</sup> Nurul Huda, et.al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 22-25.

keduanya memiliki peran masing-masing yang tidak bisa diabaikan.<sup>46</sup>

#### 4. Kemiskinan Dalam Islam

Al-Qur'an berbicara tentang kemiskinan jauh berabad-abad silam sebagai bagian dari misi revolusi masyarakat Arab yang terjebak dalam jurang ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin. Secara etimologis, lafadz *miskîn* merupakan *isim masdar* yang berasal dari *sakana-yaskunu-sukûn/miskîn*. Dilihat dari asalnya, *sakana-sukûn*, kata ini memiliki makna 'diam', 'tetap' atau *reda*. Al-Asfihani dan Ibn Mansur mengartikan kata ini sebagai 'tetapnya sesuatu setelah ia bergerak'. Selain arti tersebut, kata *sakana-sukûn* juga bisa diartikan sebagai 'tempat tinggal'.<sup>47</sup>

Jika dilihat dari makna aslinya yang berarti 'diam', maka kata *miskîn* dapat ditarik arti secara istilah, yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk

---

<sup>46</sup> Nurul Huda, et.al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 22-25.

<sup>47</sup> Sahabuddin, *Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jilid I (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 610.

memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kemiskinan. Orang tersebut dapat memperoleh sesuatu dikarenakan ia tidak bergerak dan tidak ada kemauan atau peluang untuk bergerak, sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. al-Kahfi ayat 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا  
وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

*“adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin Yang bekerja di laut; oleh itu, Aku bocorkan Dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja Yang merampas tiap-tiap sebuah perahu Yang tidak cacat”<sup>48</sup>*

Manusia memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak terkecuali kuasa atas dirinya keluar dari kemiskinan dan melakukan perubahan sosial. Ayat yang sering dirujuk kaitannya dengan hal tersebut adalah QS. Al-Ra'd ayat 11:

---

<sup>48</sup> MUI Provinsi Banten, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani* (Banten: Lembaga Percetakan Al-Quran Kementerian Agama RI, 2012), 302.



semakin bertambahnya produksi dan semakin meningkatnya pemasukan secara umum akan berdampak positif dan efektif dalam memerangi fenomena kemiskinan.<sup>50</sup>

Perlu diketahui bahwa, Pendapatan Nasional (national income) merupakan tolak ukur yang paling baik untuk menunjukkan keberhasilan dan kegagalan perekonomian suatu negara, dari tingkat kesempatan kerja, tingkat harga barang, dan posisi neraca pembayaran luar negeri, serta pendapatan per kapitanya. Jika faktor-faktor yang memengaruhi tersebut menunjukkan posisi yang sangat menguntungkan atau positif, maka tingkat keberhasilan atau tingkat kemajuan ekonomi suatu negara akan mudah tercapai, dan begitu pula sebaliknya.

Dalam ekonomi islam terdapat parameter al-falah. Falah adalah kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenar-benarnya, dimana komponen-komponen ruhaniah masuk kedalam pengertian falah ini. Ekonomi

---

<sup>50</sup> Yusuf Qaradhawi, *Teologi Kemiskinan; Dokrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan* (Jakarta: Mitra Pustaka, 2002), 106.

Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi atau (midhom al-iqtishad) merupakan sebuah sistem yang dapat mengantarkan umat manusia kepada falah, kesejahteraan yang sebenarnya diwujudkan pada peningkatan GNP yang tinggi yang kalau dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan per capita income yang tinggi.

Penghitungan pendapatan nasional Islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output per kapita tersebut, karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islami bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan dengan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>51</sup>

Tujuan utama pembangunan adalah pengentasan kemiskinan. Paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi tingkat pembangunan: Pertama, investible resources (sumber daya yang dapat diinvestasikan). Maksudnya adalah segala sumber daya yang dapat

---

<sup>51</sup> Nurul Huda, et.al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 23.



digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain SDA, SDM dan modal.

SDA adalah anugerah dari Allah yang disiapkan untuk kepentingan manusia. Adapun sumber daya modal adalah potensi dana yang bisa dioptimalkan, antara lain saving rate di suatu negara. Saving rate adalah proporsi dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan yang dapat digunakan sebagai modal untuk membiayai pembangunan. Tinggal bagaimana caranya agar dana-dana tersebut bisa disalurkan kepada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Hal ini sangat tergantung dengan SDM.<sup>52</sup>

Faktor kedua, SDM dan entrepreneurship. Ketika basis pembangunan ekonomi Islam adalah sektor ril, maka memiliki SDM yang berjiwa entrepreneurship sebuah keniscayaan. Karena kemandirian ekonomi suatu negara dapat dicapai melalui pemenuhan dua hal, yaitu optimalisasi potensi lokal dan pengembangan budaya

---

<sup>52</sup> Nurul Huda, et.al, *Pembangunan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 35.

bisnis berbasis syariah. Optimalisasi potensi lokal berarti tidak pernah bergantung pada pihak lain, atau bergantung pada impor dan produk yang dihasilkan oleh negara lain.

Dan, faktor ketiga adalah teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi merupakan faktor yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melarikan efisiensi dan basis teknologi adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian tentang kemiskinan diberbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain :

1. Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto<sup>53</sup>

Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh PDB dan IPM terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan

---

<sup>53</sup> Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, "Pengaruh produk domestik bruto (pdb) dan indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap angka kemiskinan di indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8.2 (2010): 357-366.

PDB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan hanya saja berbeda tingkat signifikansinya yaitu untuk PDB signifikan pada  $\alpha$  20% dan untuk IPM signifikan pada  $\alpha$  5%.

## 2. Anggit Yoga Permana

Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan PDRB, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Anggit Yoga Permana and Fitrié Arianti. *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*. (Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2012)

### 3. Prima Sukmaraga<sup>55</sup>

Melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

### 4. Ravi Dwi Wijayanto<sup>56</sup>

Melakukan penelitian yang berjudul ”Analisis pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah tahun 2005 – 2008”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>55</sup> Prima Sukmaraga and Banatul Hayati. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah* (Diss. Universitas Diponegoro, 2011)

<sup>56</sup> Ravi Dwi Wijayanto and Fitri Arianti. *Analisis pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008* (Diss. Universitas Diponegoro, 2010)

variabel PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pengangguran berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

### **C. Hubungan Antar Variabel**

#### **1. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan**

Apriliyah S. Napitupulu, mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita.<sup>57</sup> Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi

---

<sup>57</sup> Napitupulu, Apriliyah S. "Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara." (2007).

pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah. Makin tinggi kualitas sumber daya manusia, makin tinggi pula tuntutan atas hasil-hasil produksi. Dengan demikian sumber daya manusia seperti ini merupakan perangsang kegiatan industri dan kegiatan lainnya dalam pembangunan.

Todaro juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Irma Adelman menyarankan pengembangan sumber daya manusia sebagai sebagai upaya mengentaskan ketimpangan.<sup>58</sup> Salah satu penyebab ketimpangan yang terjadi adalah adanya kesenjangan antara pertumbuhan

---

<sup>58</sup> Nunuk Dwi Retnandari, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dalam Kebijakan Publik*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 160.

investasi yang menggunakan teknologi dengan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Untuk mengejar ketertinggalan itu diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Menurut Yani Mulyaningsih, indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.<sup>59</sup>

Lanjouw, dkk menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan.

---

<sup>59</sup> Mulyaningsih, Yani. *Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan* (Diss. Universitas Indonesia. Program Pascasarjana, 2008)

Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.<sup>60</sup>

## **2. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan**

Menurut Todaro, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam

---

<sup>60</sup> Lanjouw, Jean Olson. "Demystifying poverty lines." *Series on Poverty Reduction (New York, UNDP, 1997)* (2001).



pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Menurut Sadono Sukirno, laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi : Teori Pengantar Edisi Ke-3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 212.

Menurut Mudrajad Kuncoro pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, Kabupaten, atau kota.<sup>62</sup>

Kuznets berpendapat bahwa pada awal pembangunan ekonomi melalui proses industrialisasi yang dijalankan, sebuah perekonomian akan mengalami kemunduran distribusi pendapatan, namun sejalan dengan semakin majunya pembangunan ekonomi yang terjadi distribusi pendapatan akan menunjukkan pemerataan. Hipotesis ini dikenal dengan hipotesis “U terbalik”.<sup>63</sup>

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Konsep penting mengenai hipotesis adalah hipotesis nol atau  $H_0$  dan hipotesis alternatif atau  $H_a$ /  $H_1$ . Hipotesis nol adalah

---

<sup>62</sup> Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori, masalah, dan Kebijakan Edisi Ke-3* (Yogyakarta (UPP) AMP YKPN,1997), 122.

<sup>63</sup> Nunuk Dwi Retnandari, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dalam Kebijakan Publik*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 160.

hipotesis yang menyatakan tidak adanya saling hubungan antara dua variabel atau lebih sedangkan hipotesis alternatif adalah yang menyatakan adanya saling-hubungan antara dua variabel atau lebih yang mana pada umumnya, kesimpulan uji statistik berupa penerimaan hipotesis alternatif sebagai hal yang benar.<sup>64</sup>

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini juga berdasarkan atas dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah penelitian,<sup>65</sup> maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Ho : Indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten

Ha : Indeks Pembangunan Manusia diduga berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten

---

<sup>64</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 21

<sup>65</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 68.

2. Ho : Produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten

Ha : Produk domestik regional bruto diduga berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten

3. Ho : Indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten

Ha : Indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto diduga berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan mengakses website resmi Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)), website Badan Program Pembangunan PBB ([www.undp.org](http://www.undp.org)), *literature* atau buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juni 2018 sampai dengan Oktober 2018 dengan tahun pengamatan dari tahun 2010-2016 demi memperoleh data-data yang menunjukkan adanya gambaran tentang pengaruh yang ditimbulkan dari variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Banten.

## B. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data<sup>66</sup>. Data sekunder yang digunakan adalah data panel tahun 2010-2016 provinsi Banten. Penggabungan data deret waktu (time series) dengan cross section disebut dengan data panel. Data panel adalah data yang diperoleh dari data cross section yang diobservasi berulang pada unit individu (objek) yang sama pada waktu berbeda. Dengan demikian, akan diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012), 309.

<sup>67</sup> Bambang Juanda dan Junaidi, *Ekonometrika Deret Waktu; Teori dan Aplikasi* (Bogor: IPB Press, 2010), 175-176

## 2. Sumber Data

Karena jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mana data sekunder terbagi menjadi 2 sumber yaitu Internal data dan eksternal data. Dalam hal ini, Penulis memperoleh data dari luar (eksternal data), dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Banten.

Eksternal data, yaitu data yang diperoleh dari sumber luar. Umpamanya data sensus dan data register, serta data yang diperoleh dari badan atau lembaga yang aktivitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan/dalam berbagai masalah.<sup>68</sup>

Periode data yang digunakan adalah data tahun 2010 – 2016 untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Banten. Data dan sumber data yang digunakan yaitu :

- a. Data penduduk miskin untuk masing-masing kabupaten/ Kota di Provinsi Banten tahun 2010-

---

<sup>68</sup> M. Burhan Bugin, M.Si., *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 128.

2016 yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Banten Dalam Angka”,

- b. Data PDRB per kapita untuk masing-masing kabupaten/ Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2016 yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Banten Dalam Angka”,
- c. Data Indeks Pembangunan Manusia untuk masing-masing kabupaten/ Kota di Provinsi Banten tahun 2010-2016 yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Banten Dalam Angka”.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>69</sup> Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka (Hasil Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten) sebagai metode pengumpulan datanya. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>69</sup> Juliansyah Noor, *Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2014), 41.



tahun 2010-2016;. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta dari *browsing website internet* yang terkait dengan masalah kemiskinan.

#### **D. Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah variabel yang digunakan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

##### **1. Definisi Konsep**

Variabel dependen merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas.<sup>70</sup> Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kemiskinan (Y). Sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia ( $X_1$ ) dan Produk Domestik Regional Bruto ( $X_2$ ).

---

<sup>70</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Ed. Revisi 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 61.

## 2. Definisi Operasional

Penentuan variabel pada dasarnya adalah operasionalisasi terhadap konstruk, yaitu upaya mengurangi abstraksi konstruk sehingga dapat diukur. Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

a. Kemiskinan

Dapat dilihat melalui penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar. Dalam penelitian ini menggunakan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu (1) Indeks Harapan Hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; (2) Indeks Pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; (3) Indeks Pendapatan, yang diukur dengan daya beli konsumsi per kapita. Nilai indeks pembangunan manusia Indonesia yang dinyatakan dalam persen pertahun.

c. Produk Domestik Regional Bruto

Merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dalam penelitian ini digunakan

PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Nilai PDRB dinyatakan dalam juta rupiah pertahun.

## **E. Metode Analisis Data**

### **1. Regresi Linear Berganda**

Untuk dapat melihat faktor manakah yang berpengaruh secara signifikan/tidak signifikan, faktor manakah yang memberikan kontribusi besar terhadap perilaku variabel yang di pengaruhi/dijelaskan, atau faktor manakah yang memberikan kontribusi kecil terhadap perilaku variabel yang dipengaruhi, kesemuanya itu dapat di pelajari/ diketahui melalui metode analisis regresi berganda,<sup>71</sup> dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square (OLS)*.

Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi dan nilai rata-rata

---

<sup>71</sup> Muhammad Teguh, *Metode Kuantitatif Untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 103-104.

variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.<sup>72</sup>

Menurut Ghozali dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut :

$$Y_t = \beta + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \epsilon_t \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

$Y_t$  = Kemiskinan (Persen Penduduk)

$X_{1t}$  = Indeks Pembangunan Manusia (Satuan)

$X_{2t}$  = Produk Domestik Bruto (Juta Rupiah)

$B$  = Intersep/Konstanta

$B_1, \beta_2$  = Slope atau arah garis regresi yang menyatakan nilai  $Y$  akibat dari Perubahan satu unit  $X$

$\epsilon_t$  = Error/ Residual yang mewakili faktor lain

---

<sup>72</sup> Damodar Gujarati dan Sumarno Zain, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 1978), 45.

berpengaruh terhadap Y namun tidak dimasukkan dalam model.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah regresi dapat dilakukan atau tidak. Langkah-langkah dalam uji klasik adalah sebagai berikut:

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Uji Normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak.<sup>73</sup>

Uji normalitas dapat diasumsikan bahwa tiap  $\mu_i$  didistribusikan secara normal dengan nilai rata-rata dan varians sama dengan nol.<sup>74</sup> Ada dua cara

---

<sup>73</sup> Husein Umar, *Metode penelitian untuk Skripsi dan tasis Bisnis* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada:2008), 181.

<sup>74</sup> Damodar Gujarati dan Sumarno Zain, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 1978), 66.

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual).

Analisis grafik yang digunakan dengan metode normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya agak menjauh dari garis diagonal.<sup>75</sup>

Sedangkan uji statistiknya dengan menggunakan uji Normalitas Jarque Bera (JB), yang dimana dapat dilihat dari nilai probability dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians

---

<sup>75</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 156.

dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homoskedastisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>76</sup>

Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai dari varians residualnya berbeda, yang dimana varians kondisional  $Y_i$  meningkat dengan meningkatnya  $X$ . Disini, varians  $Y_i$  tidak sama dengan demikian terdapat heteroskedastisitas.<sup>77</sup>

Dapat diasumsikan sebagai berikut :

$$E(u_i^2) = \sigma_i^2$$

Berdasarkan persamaan di atas bahwa  $\sigma^2$  merupakan varians bersyarat dari  $u_i$  (sama dengan varians bersyarat dari  $y_i$ ) tidak lagi konstan, yang

---

<sup>76</sup> Haryadi, Sarjono, Winda Julianita, *SPSS vs LISREL, Sebuah pengantar aplikasi untuk riset* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 66.

<sup>77</sup> Damodar Gujarati dan Sumarno Zain, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 1978), 177.



dimana simbol  $i$  menunjukkan bahwa varian mengalami perubahan dari satu observasi ke observasi lainnya.

Keberadaan heteroskedastisitas dalam suatu model dapat dideteksi dengan metode grafis dan metode statistik. Dengan metode grafis, keberadaan heteroskedastisitas dapat diamati dengan cara menampilkan plot residual kuadrat. Jika terdapat suatu plot tertentu pada plot residul kuadrat, maka dapat dikatakan model terindikasi mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak terdapat pola-pola tertentu atau data menyebar maka terindikasi adanya homoskedastisitas.<sup>78</sup>

Sedangkan dalam metode statistik, pengujian heteroskedastisitas menggunakan Uji White. Pada uji White, dihitung nilai statistik uji White  $W = nR^2$  dengan  $n$  menunjukkan banyaknya data,

---

<sup>78</sup> Setyo Tri Wahyudi, *Konsep dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 205.

sedangkan  $R^2$  adalah nilai koefisien determinasi dari persamaan regresi semu antara residual (sebagai variabel dependen) dengan variabel-variabel independen, kuadrat dan interaksi antar variabel independen dalam model regresi yang diuji.<sup>79</sup>

c. Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali, uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini

---

<sup>79</sup> Dedi Rosadi, *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), 53.

sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*).

Uji autokorelasi dapat diidentifikasi sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross-section*).<sup>80</sup> Dalam konteks regresi, model regresi linear mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbansi atau gangguan  $u_i$ .

Dengan asumsi sebagai berikut :

$$E(u_i u_j) = 0 \quad i \neq j$$

Berdasarkan asumsi di atas bahwa nilai kovarians antara  $I$  dan  $j$  dua pengamatan berbeda dan gangguan  $u_i$  dan  $u_j$  tidak berkorelasi. Maka dapat diasumsikan bahwa tidak adanya korelasi berurutan atau tidak ada autokorelasi, yang dimana  $X_i$  tertentu dalam simpangan setiap dua  $Y$  yang

---

<sup>80</sup> Damodar Gujarati dan Sumarno Zain, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 1978), 201.

manapun dari nilai rata-ratanya tidak menunjukkan pola.<sup>81</sup> Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Pada penelitian ini penulis akan melakukan uji autokorelasi dengan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Hipotesis yang akan diuji adalah :

- ✓  $H_0$  : Tidak ada autokorelasi
- ✓  $H_a$  : Ada autokorelasi

Keputusan untuk menolak setiap pasangan hipotesa dengan cara membandingkan nilai pro chi square dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%.

d. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti,

---

<sup>81</sup> Damodar Gujarati dan Sumarno Zain, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 1978), 35.

diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.<sup>82</sup> Jika *independent variable* berkorelasi dengan sempurna, maka disebut multikolinieritas sempurna yang berarti ada hubungan linear yang “sempurna” (pasti) diantara beberapa atau semua *independent variable* dari model regresi. Jika multikolinieritasnya kurang sempurna, koefisien regresinya walaupun tertentu, memiliki standard error yang besar, yang artinya koefisien-koefisien tersebut tidak dapat diestimasi dengan akurat.

Uji multikolinieritas dapat dilihat dengan nilai VIF atau *Tolerance Value* yang dimana dapat diasumsikan sebagai berikut :

- Jika nilai VIF masing-masing variabel bebas kurang dari 10 atau *Tolerance Value* di atas

---

<sup>82</sup> Damodar N. Gujarati dan Dawn C. Porter, *Dasar-dasar Ekonometrika*, Ed. 5 (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 408.

0,1 maka tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.<sup>83</sup>

- Sebaliknya jika nilai VIF masing-masing variabel bebas lebih dari 10 atau *Tolerance Value* kurang dari 0,1 maka terdapat masalah multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

### 3. Uji Statistis

Adapun uji statistik yang harus dipenuhi dalam regresi linear berganda yaitu sebagai berikut :

#### a. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t-Statistik)

Untuk pengujian secara parsial dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan hipotesis nol. Selanjutnya nilai t yang dihitung dibandingkan dengan nilai t pada tabel sebagai daerah kritis penerimaan atau penolakan hipotesis dengan nilai signifikansi kurang dari 5%. Apabila t hitung  $>$  t

---

<sup>83</sup> Damodar Gujarati dan Sumarno Zain, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 1978), 157.

tabel maka kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.<sup>84</sup>

Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $\beta_i$ ) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : \beta_k = 0$$

Keterangan :

$$\beta_k = \text{Jumlah Koefisien Regresi}$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a : \beta_k \neq 0$$

---

<sup>84</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 44.

Artinya, variabel tersebut merupakan variabel yang signifikan terhadap variabel dependen.

Keputusan untuk menerima atau menolak  $H_0$  didasarkan pada perbandingan  $t$  hitung dan  $t$  tabel (nilai kritis) dalam hipotesis :

- $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima;
- $t$  hitung  $<$   $t$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

**b. Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F Statistik)**

Dalam Gujarati, uji Fisher (uji F) merupakan alat uji statistik secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk membuktikan apakah koefisien determinasi bersama bermakna atau tidak maka digunakan Uji F. Apabila nilai  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel maka  $H_0$  ditolak



dan menerima  $H_a$ . Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

Keterangan :

$$\beta_k = \text{Jumlah Koefisien Regresi}$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Keputusan untuk menerima atau menolak  $H_0$  didasarkan pada

perbandingan  $f$  hitung dan  $f$  tabel (nilai kritis) dan Menentukan taraf nyata (*signifikansi level*), yaitu  $\alpha = 5\% = 0,05$  dalam hipotesis :

- $F$  hitung  $>$   $F$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima;
- $F$  hitung  $<$   $F$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### c. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien derterminasi ( $R^2$ ) merupakan ukuran iktisar yang mengatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data dan merupakan besaran yang paling lazim digunakan untuk mengukur kesesuaian garis regresi atau model regresi sampel dengan data sebenarnya. Secara verbal,  $r^2$  mengukur proporsi (bagian) atau prosentasi total variasi dalam  $Y$  yang dijelaskan oleh model regresi.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Damodar Gujarati dan Sumarno Zain, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 1978), 45.

Dalam hubungan (konteks) regresi,  $r^2$  adalah ukuran yang lebih berarti dari pada  $r$  karena  $r^2$  dapat mengukur suatu proporsi variasi dalam variabel tak bebas yang dijelaskan oleh variabel yang menjelaskan dan karenanya memberikan suatu ukuran keseluruhan mengenai sejauh mana variasi dalam satu variabel menentukan variasi dalam variabel lain.

Namun, dalam penelitian ini membantu perhitungan dengan melihat *tabel summary* nilai  $R^2$ . Dimana nilai Adjusted R square itu semakin tinggi, maka dapat dikatakan bahwa koefisien determinasi antar variabel semakin kuat.

#### **4. Hipotesis Statistik**

- a. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

- b. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

- c. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016.

$$H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

## BAB IV

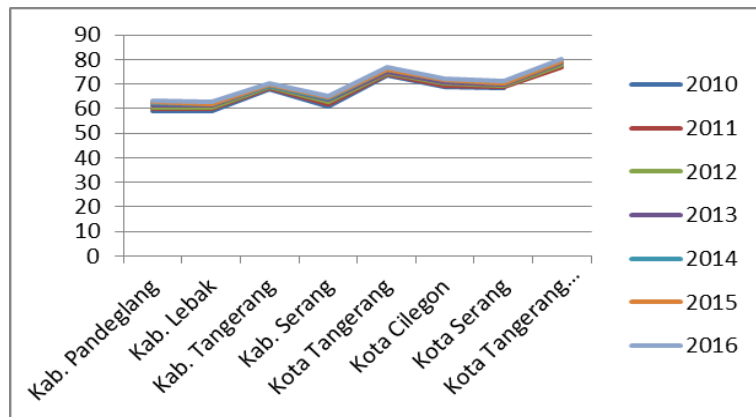
### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Provinsi Banten

##### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Gambar 4.1

Grafik Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia  
di Banten tahun 2010-2016



Gambar diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan di lihat secara menyeluruh ataupun per- masing-masing Kabupaten/ Kota. Kota Tangerang Selatan menempati urutan pertama dalam tingginya tingkat indeks pembangunan manusia kecuali tahun 2010, sedangkan

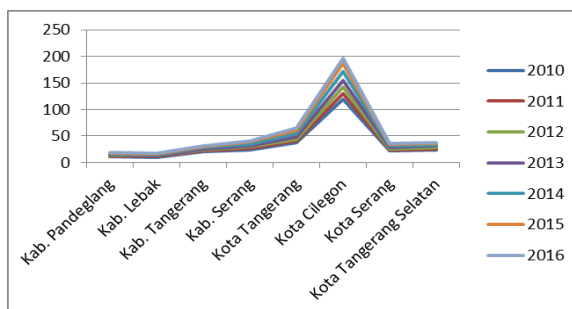
kabupaten Lebak menempati urutan pertama dalam rendahnya tingkat indeks pembangunan manusia.

## 2. Produk Domestik Regional Bruto

**Gambar 4.2**

### **Grafik Pertumbuhan Produk Domestik Regional**

#### **Bruto di Banten tahun 2010-2016**



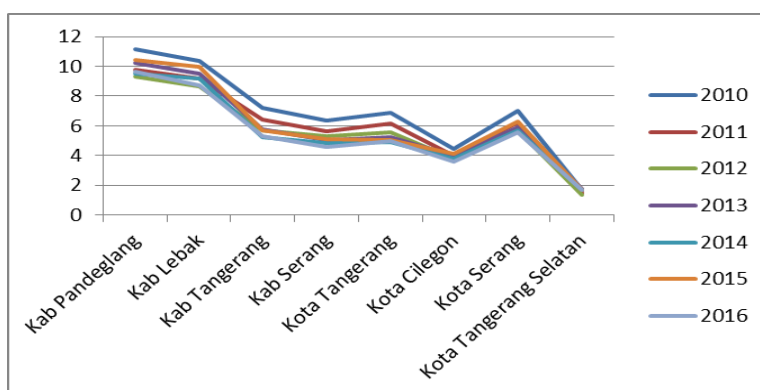
Gambar diatas menunjukkan Produk domestik regional bruto perkapita di provinsi Banten terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di lihat secara menyeluruh ataupun per- masing-masing Kabupaten/ Kota. Kota Cilegon menempati urutan pertama sebagai penyumbang PDRB tertinggi sepanjang periode 2010-2016, sedangkan penyumbang PDRB terendah sepanjang periode 7 tahun yaitu kabupaten Pandeglang.

### 3. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan selama kurun waktu 7 tahun sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Namun dari tahun ke tahunnya jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi yang tidak menentu. Kabupaten Pandeglang menempati urutan pertama dalam tingginya penduduk miskin sedangkan Kota Cilegon menempati urutan pertama dalam rendahnya penduduk miskin. Data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

**Gambar 4.3**

**Grafik Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan di Banten tahun 2010-2016**



## B. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berupa laporan yang telah dikumpulkan oleh berbagai lembaga dan dipublikasikan kepada masyarakat umum untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah data Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto dan Kemiskinan berupa data *panel* tahunan yakni dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Data penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.

**Tabel 4.1**

### **Data Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota**

**(% dari populasi) 2010-2016**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kab Pandeglang	11,14	9,8	9,28	10,25	9,5	10,43	9,67
Kab Lebak	10,38	9,2	8,63	9,5	9,17	9,97	8,71
Kab Tangerang	7,18	6,42	5,71	5,78	5,26	5,71	5,29
Kab Serang	6,34	5,63	5,28	5,02	4,87	5,09	4,58
Kota Tangerang	6,88	6,14	5,56	5,26	4,91	5,04	4,94



Kota Cilegon	4,46	3,98	3,82	3,99	3,81	4,1	3,57
Kota Serang	7,03	6,25	5,7	5,92	5,7	6,28	5,58
Kota Tangerang Selatan	1,67	1,5	1,33	1,75	1,68	1,69	1,67
Provinsi Banten	7,46	6,26	5,71	5,89	5,51	5,9	5,42
Pertumbuhan	-8%	-16%	-9%	3%	-6%	7%	-8%

*Sumber: BPS Provinsi Banten (Data diolah)*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Banten sepanjang tahun 2010-2016 mengalami fluktuasi yang tidak menentu baik dilihat secara menyeluruh ataupun per kabupaten/kota.

Ditahun 2010 terdapat 7.46% dari jumlah populasi yang merupakan penduduk miskin. Kemudian di tahun 2011 terdapat 6.26% yang artinya persentase jumlah penduduk miskin telah mengalami penurunan 16%. Dan di tahun 2012 kembali berkurang dengan persentase penduduk miskin sebesar 5.71% dari jumlah penduduk. Sementara di tahun 2013 persentase penduduk miskin mencapai 5.89% dari jumlah populasi, artinya kemiskinan di tahun 2013 mengalami kenaikan, namun kembali turun di tahun 2014

dengan persentase penduduk miskin sebesar 5.51%. Dan di tahun 2015 terdapat 5.9% dari jumlah populasi yang merupakan penduduk miskin, angka yang kembali naik dari tahun 2014, tetapi turun kembali di tahun 2016 dengan angka 5.42% dari jumlah penduduk di Banten.

Sepanjang tahun 2010-2016 di setiap tahunnya angka kemiskinan tertinggi yaitu berada di Kabupaten Pandeglang dan terendah berada di Kota Tangerang Selatan. Ini menunjukkan bahwa persentase penduduk pedesaan yang hidup dibawah kemiskinan lebih banyak dibanding dengan perkotaan. Sementara angka persentase penduduk miskin tersebut menggambarkan sejumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan di Banten.

**Tabel 4.2**  
**Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut**  
**Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten, 2010-2016**

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab. Pandeglang	59.08	59.92	60.48	61.35	62.06	62.72	63.4
Kab. Lebak	58.83	59.82	60.22	61.13	61.64	62.03	62.78
Kab. Tangerang	68.01	68.45	68.83	69.28	69.57	70.05	70.44
Kab. Serang	60.96	61.97	62.97	63.57	63.97	64.61	65.12
Kota Tangerang	73.69	74.15	74.57	75.04	75.87	76.08	76.81
Kota Cilegon	68.8	69.26	70.07	70.99	71.57	71.81	72.04
Kota Serang	68.25	68.69	69.43	69.69	70.26	70.51	71.09
Kota Tangerang Selatan	-	76.99	77.68	78.65	79.17	79.38	80.11
<b>Povinsi Banten</b>	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96
Pertumbuhan	0.87%	1.01%	1.03%	0.80%	0.60%	0.54%	0.98%

*Sumber: BPS Provinsi Banten (Data diolah)*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan di lihat secara menyeluruh ataupun per- masing-masing Kabupaten/ Kota. Tahun 2011 68.22 meningkat 1.01% dari tahun 2010 dengan IPM sebesar 67.54. Ditahun 2010 IPM untuk kota Tangerang Selatan masih belum ada.

Di tahun 2012 meningkat sebesar 1.03% dari tahun 2011 dengan IPM 68.92. Kemudian meningkat 0.80% di tahun 2013 dengan 69.47 dan kembali meningkat sebesar 0.60% di tahun 2014 dengan IPM sebesar 69.89. Dan di tahun 2015 IPM mencapai angka 70.27 yang artinya meningkat sebesar 0.54% dari tahun sebelumnya dan kemudian di tutup dengan kenaikan sebesar 0.98% di tahun 2016 dengan IPM sebesar 70.96.

Meningkatnya IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan manusia di suatu wilayah yang mencakup dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar manusia.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> BPS Provinsi Banten, *Banten Dalam Angka 2017*, (Banten: CV. Dharmaputra, 2017), 441.

**Tabel 4.3**  
**Data Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Menurut**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Juta Rupiah),**  
**2010–2016**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kab Pandeglang	10.639	11.766	12.887	13.9	15.318	17.022	18.466
Kab Lebak	10.397	11.416	12.24	13.416	14.766	16.282	17.608
Kab Tangerang	20.37	22.262	23.662	25.515	27.999	30.133	31.394
Kab Serang	24.021	26.822	29.241	31.685	35.077	38.457	41.28
Kota Tangerang	37.004	40.779	43.919	48.433	54.981	60.904	64.997
Kota Cilegon	118.693	129.792	141.651	155.025	172.092	187.47	196.843
Kota Serang	21.607	23.856	25.576	28.204	31.148	33.966	36.533
Kota Tangerang Selatan	23.508	25.921	28.02	30.724	33.539	36.3	38.098
Provinsi Banten	25.398	27.977	30.202	32.992	36.629	40.028	42.311
Pertumbuhan	8%	10.15%	7.95%	9.23%	11.02%	9.28	5.70%

*Sumber: BPS Provinsi Banten (Data diolah)*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan PDRB Perkapita selama kurun waktu 2010-2016 meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, PDRB Provinsi senilai 25.398 juta rupiah, di tahun 2011 senilai 29.977 juta rupiah, artinya telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 10.15%.

Kemudian di tahun 2012 PDRB Provinsi senilai 30.202 juta rupiah, 7.95% dari tahun 2011. Dan di tahun 2013 PDRB Provinsi senilai 32.992, kembali meningkat dari tahun 2011 sebesar 9.23%. Kemudian di tahun 2014 PDRB mengalami kenaikan sebesar 11.02% dari tahun sebelumnya dengan angka PDRB sebesar 36.629. Sedangkan di tahun 2015 PDRB mencapai angka 40.028 juta rupiah naik sebesar 9.28% dan ditutup dengan kenaikan 5.70% di tahun 2016 dengan PDRB sebesar 42.311.

Meningkatnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan meningkatnya kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu<sup>87</sup>, dalam hal ini nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi (lapangan usaha) atas berbagai aktivitas produksinya.

---

<sup>87</sup> BPS Provinsi Banten, *Banten Dalam Angka 2017* (Banten: CV. Dharmaputra, 2017), 442.

### C. Uji Persyaratan Analisis

#### 1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh sejumlah variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. Berdasarkan analisis dengan menggunakan program *Eviews 9* diperoleh hasil dengan persamaan berikut :

**Tabel 4.4**

#### Hasil Output Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.24495	2.238963	12.61519	0.0000
IPM	-0.316937	0.033440	-9.477711	0.0000
PDRB	-0.011518	0.004414	-2.609356	0.0118

*Sumber : software E-Views*

Berdasarkan table diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut :  $Y = 28.244495 - 0.316937X_1 - 0.011518X_2 + \epsilon_t$  . Hasil persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 28.244495 menyatakan bahwa jika nilai variabel IPM dan PDRB tidak berubah atau konstan, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Banten yaitu 28.244495 persen.
2. Hasil regresi pada persamaan koefisien dari IPM sebesar -0.316937 yang berarti bahwa setiap kenaikan IPM sebanyak 1 satuan akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Banten sebesar 0.316937 persen.
3. Hasil regresi pada persamaan koefisien dari PDRB sebesar -0.011518 yang berarti bahwa setiap penambahan PDRB sebanyak 1 juta rupiah akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Banten sebesar 0.011518 persen.



## 2. Analisis Model Regresi Linear Berganda

### 2.1 Uji Hipotesis

#### a) Uji T-Statistik (Uji Parsial)

Uji T-Statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas pada derajat keyakinan tertentu. Hasil pengujian indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto secara parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**

#### Hasil Output Uji T-Statistik (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	28.24495	2.238963	12.61519	0.0000
IPM	-0.316937	0.033440	-9.477711	0.0000
PDRB	-0.011518	0.004414	-2.609356	0.0118

*Sumber : software E-Views*

a. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2010-2016

Berdasarkan hasil regresi pada  $\alpha = 5\%$  menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada tabel sebesar 0.0000,  $0.0000 < 0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2010-2016.

b. Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2010-2016

Berdasarkan hasil regresi pada  $\alpha = 5\%$  menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada tabel sebesar 0.0118,  $0.0118 < 0,05$  yang artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2010-2016.

### b) Uji F-Statistik (Uji Simultan)

Uji F-Statistik dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas pada derajat keyakinan sebesar 5%. Hasil pengujian indeks pembangunan manusia dan produk domestik bruto secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Banten tahun 2010-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.6**

#### Hasil Output Uji F-Statistik (Uji Simultan)

R-squared	0.709674	Mean dependent var	6.042364
Adjusted R-squared	0.698507	S.D. dependent var	2.572497
S.E. of regression	1.412516	Akaike info criterion	3.581623
Sum squared resid	103.7504	Schwarz criterion	3.691114
Log likelihood	-95.49463	Hannan-Quinn criter.	3.623964
F-statistic	63.55441	Durbin-Watson stat	0.486552
Prob(F-statistic)	0.000000		

*Sumber : software E-Views*

Berdasarkan hasil Uji F diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.000000. Dengan  $\alpha = 5\%$ ,  $0.000000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia dan PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016.

## 2.2 Uji Kecocokan Model (Koefisien Determinasi ( $R^2$ ))

**Tabel 4.7**

### Hasil Output Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.709674	Mean dependent var	6.042364
Adjusted R-squared	0.698507	S.D. dependent var	2.572497
S.E. of regression	1.412516	Akaike info criterion	3.581623
Sum squared resid	103.7504	Schwarz criterion	3.691114
Log likelihood	-95.49463	Hannan-Quinn criter.	3.623964
F-statistic	63.55441	Durbin-Watson stat	0.486552
Prob(F-statistic)	0.000000		

*Sumber : software E-Views*

Berdasarkan hasil output di atas, diperoleh nilai R Square ( $R^2$ ) sebesar 0.709674. Hasil

koefisien determinasi  $R^2$  menerangkan indeks pembangunan manusia dan PDRB memberi pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016 sebesar 70.96% sedangkan sisanya 29.04% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian di antaranya yaitu: inflasi, Tingkat pendidikan, dan Tingkat pengangguran.

### **3. Uji Asumsi Klasik**

Pada uji persyaratan ini, penulis melakukan uji asumsi klasik untuk menguji data penelitiannya. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik dari hasil penelitian dalam regresi dengan persamaan model yang telah memenuhi syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Berikut uji asumsi klasik yang telah dilakukan:

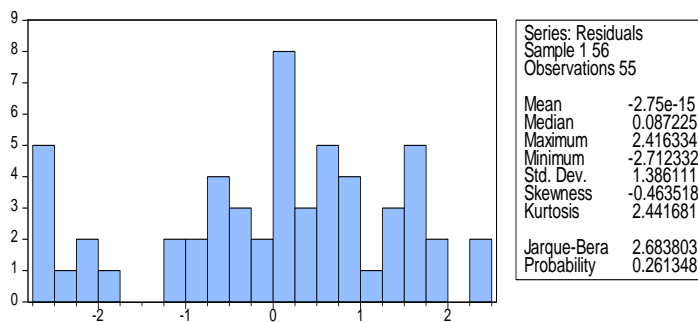
**a. Uji Normalitas**

Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan dapat dilihat dari uji statistik Normalitas Jarque Bera (JB). Uji ini digunakan untuk melihat apakah data residual berdistribusi normal atau tidak dengan menguji hipotesis sebagai berikut :

- $H_0 : p < 0,05$  maka data residual tidak berdistribusi normal
- $H_a : p > 0,05$  maka data residual berdistribusi normal

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan yaitu dengan uji statistik Jarque-Bera dengan menggunakan *Eviews 9*, didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

**Gambar 4.4**  
**Hasil Output Uji Normalitas**



Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai jarque bera sebesar 2.683803 dengan nilai probabilitas sebesar 0.261348, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 5%, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini dapat dikatakan bahwa data residual berdistribusi normal.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan uji White dengan menguji hipotesis sebagai berikut :

- $H_0$ : Probabilitas  $Obs^* R\text{-square} < 0,05$  maka model regresi terdapat heteroskedastisitas;
- $H_a$ : Probabilitas  $Obs^* R\text{-square} > 0,05$  maka model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas

Penelitian uji White dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual. Berdasarkan hasil uji White yang telah dilakukan menggunakan *Eviews 9*, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.8**

**Hasil Output Uji White**

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.761118	Prob. F(2,45)	0.1819
Obs*R-squared	3.489106	Prob. Chi-Square(2)	0.1747
Scaled explained SS	2.248199	Prob. Chi-Square(2)	0.3249

*Sumber : software E-Views*



Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa nilai Prob. Chi square(2) pada Obs\*R-Squared sebesar 0.1747 dengan nilai signifikansi sebesar 5% atau 0.05. Maka dapat diketahui nilai p value 0.1747 lebih besar dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti model regresi tersebut tidak ada masalah asumsi heteroskedastisitas.

### c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dengan hipotesis sebagai berikut :

- $H_0$ : Probabilitas Obs\* R-square  $> 0,05$  maka tidak terdapat Autokorelasi;
- $H_a$ : Probabilitas Obs\* R-square  $< 0,05$  maka terdapat Autokorelasi.

Sesuai dengan uji yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil Uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* menggunakan *Eviews 9* sebagai berikut :

**Tabel 4.9****Hasil Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	1.623974	Prob. F(2,50)	0.2078
Obs*R-squared	3.358989	Prob. Chi-Square(2)	0.1865

*Sumber : software E-Views*

Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa nilai Prob Chi Square(2) sebesar 0.1865 dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Maka dapat diketahui bahwa p value 0.1865 lebih besar dari 0,05 yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak ada masalah autokorelasi.

**d. Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan uji *Correlations* dengan hipotesis sebagai berikut :

- $H_0$  : Matriks Correlation  $< 0,9$  maka tidak terdapat multikolinearitas;
- $H_a$  : Matriks Correlation  $> 0,9$  maka terdapat multikolinearitas;

Sesuai dengan uji yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil *Test Uji Correlations* menggunakan *Eviews 9* sebagai berikut :

**Tabel 4.10**

**Hasil Output Uji Correlations**

	IPM	PDRB
IPM	1	0.33230
PDRB	0.33230	1

*Sumber : software E-Views*

Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel bebas sebesar 0.33230 yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan tidak ada masalah multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan dilakukan uji simultan kedua variabel yang yang di teliti (IPM dan PDRB) memperoleh probabilitas sebesar 0.000000, lebih kecil dibanding taraf signifikansi 0,05.

Adapun secara parsial Indeks pembangunan manusia dengan probabilitas sebesar 0.0000, lebih kecil jika di bandingkan dengan taraf signifikansi 5%. Begitupun juga dengan variabel Produk domestik regional bruto yang setelah dilakukan analisis diperoleh probabilitas sebesar 0.0118, lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi sebesar 5%.

Berdasarkan hasil Uji F diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.000000. Artinya secara simultan variabel indeks pembangunan manusia dan produk domestik bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di Banten.

Penelitian ini sejalan dengan Siregar dan Wahyuniarti yang meneliti mengenai dampak pertumbuhan ekonomi

terhadap penurunan jumlah penduduk miskin diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun dengan magnitude yang relatif kecil, seperti inflasi, populasi penduduk, *share* sektor pertanian, dan sektor industri.<sup>88</sup>

Sitepu dan Sinaga mengkaji mengenai dampak investasi sumber daya manusia terhadap kemiskinan diperoleh hasil bahwa Investasi sumberdaya manusia untuk pendidikan dapat menurunkan *poverty incidence*, *poverty depth* dan *poverty severity* kecuali untuk rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa, bukan angkatan kerja di kota dan bukan pertanian golongan atas di kota, sedangkan investasi kesehatan hanya di rumahtangga bukan pertanian golongan atas di kota yang mengalami peningkatan sementara rumah tangga lainnya mengalami penurunan indeks kemiskinan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin* (ITB, 2011).

<sup>89</sup> Rasin Karo Karo Sitepu, et al. "Dampak Investasi Sumber Daya Manusia terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia." *Forum Pascasarjana Institut Pertanian Bogor*. Vol. 32. No. 2. 2009.

Selain itu, dikutip dari Todaro, penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circke of poverty*) dari Nurkse. Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya.<sup>90</sup>

Oleh karena itu, meningkatkan jumlah produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia sangatlah penting agar tingkat penduduk miskin di provinsi Banten menjadi semakin rendah.

---

<sup>90</sup> Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang Jilid 1 Edisi ke-3* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 241.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada Pengaruh indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016 didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji koefisien regresi secara parsial diperoleh probabilitas atas indeks pembangunan manusia sebesar 0.0000. Nilai probabilitas < dibanding dengan tingkat signifikansi 0.05. Artinya indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.
2. Berdasarkan uji koefisien regresi secara parsial diperoleh probabilitas produk domestik regional bruto sebesar 0.0118. Nilai probabilitas < dibanding dengan tingkat signifikansi 0.05. Artinya produk domestik

regional bruto memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

3. Berdasarkan uji koefisien regresi secara simultan atau bersama-sama, dapat diketahui bahwa hasil indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000. Nilai probabilitas  $<$  dibanding dengan tingkat signifikansi 0.05. Artinya secara simultan indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Banten tahun 2010-2016.
4. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0.709674. Hasil koefisien determinasi  $R^2$  menerangkan indeks pembangunan manusia dan PDRB memberi pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016 sebesar 70.96% sedangkan sisanya 29.04% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian



diataranya yaitu: inflasi, Tingkat pendidikan, dan Tingkat pengangguran.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016 dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat melanjutkan periode waktu penelitian serta dapat menggunakan beberapa variabel terkait lainnya yang mungkin dapat dijadikan sebagai faktor naik turunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih *uptodate*, baik, jelas, dan akurat.
2. PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, sehingga diharapkan bahwa pemerintah provinsi Banten dapat membantu meningkatkan total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di seluruh

Kabupaten/ Kota di Banten supaya peningkatan PDRB dapat menekan angka kemiskinan.

3. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi sumber daya manusia maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan pemerintah dapat melakukan upaya seperti peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill, program pendidikan yang baik dsb.